

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) telah menjadi tren global masa kini (United Nations Conference on Trade and Development., 2018). Para pemangku kepentingan yang tertarik dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) perusahaan semakin meningkat. Hal yang menjadi fokus mereka ada tiga yaitu *Environmental, Social, dan Governance (ESG)*. Isu terkait *Environmental, Social, dan Governance (ESG)* telah mengubah entusiasme dari spekulator, pemegang saham dan pemerintah dalam melihat risiko manajemen dimana bagi perusahaan, ketiga dimensi ini telah berubah menjadi strategi meningkatkan keunggulan kompetitif (Tarmuji, Ruhanita, & Nor, 2016) .

Saat ini masyarakat dunia tengah menghadapi permasalahan yang sulit dihindarkan. PBB mencatat bahwa penduduk dunia akan mencapai sembilan milyar pada pertengahan abad 21 yang saat ini diperkirakan telah mencapai sekitar 7,3 milyar jiwa. Permintaan bahan makanan dan bahan bakar semakin meningkat. 54% penduduk dunia bermukim di perkotaan dan diperkirakan melonjak menjadi 66% pada tahun 2050. Disamping itu, kesenjangan pendapatan semakin meningkat. Kemiskinan dan pengangguran masih mewarnai sebagian besar belahan dunia. Masih sangat

terasa ketidaksetaraan dalam setiap dimensi, baik dimensi pendidikan, *gender*, etnik dan kelompok-kelompok ras. Lebih ironis lagi sekitar 1,2 miliar penduduk dunia masih hidup tanpa listrik. 2,8 miliar orang masih memasak makanan dengan menggunakan bahan bakar padat. 748 juta orang masih tidak memiliki akses jalan. Pertumbuhan ekonomi global melambat (hanya 3,4% pada tahun 2014). Pengrusakan lingkungan (hutan dan sumber daya laut/pesisir) masih terjadi dimana-mana. Perubahan iklim dan polusi yang belum teratasi dengan baik. Kepunahan keanekaragaman hayati dan penurunan jumlah sumber daya termasuk energi dan air sudah sangat mengkhawatirkan (Tribunnews.com).

Pada 2 Agustus 2015, di markas PBB, New York, secara aklamasi 193 negara anggota PBB mengadopsi dokumen yang berjudul *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Pertemuan ini dilanjutkan dengan *development summit* yang berlangsung 25-27 September 2015, di tempat yang sama. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari 193 negara anggota dan berhasil mengesahkan dokumen yang disebut dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang memuat 17 tujuan dan terbagi ke dalam 169 target untuk menjadikan kehidupan manusia lebih baik (Mediaindonesia.com). Di Indonesia sendiri, pemerintah telah mengeluarkan Perpres No. 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam Perpres telah dijelaskan bahwa seluruh masyarakat dituntut untuk berpartisipasi dalam

pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, tidak terkecuali perusahaan sebagai pelaku bisnis.

Penelitian yang dilakukan oleh *UN-backed Principles for Responsible Investment (PRI)* dan *the UN Environment Programme Finance Initiative (UNEP-FI)* menemukan bahwa sebanyak 3000 perusahaan publik teratas bertanggung jawab sebesar \$2.15 milyar dari total \$6.6 milyar biaya yang disebabkan kerusakan lingkungan global, atau sepertiga dari total kerusakan lingkungan global (environmentalleader.com). Selain itu, hal ini semakin diperparah dengan dampak negatif yang dihasilkan ke kehidupan sosial masyarakat dan pemerintah misalnya saja pada tanggal 31 Maret 2018 terjadi kebakaran akibat terbakarnya tumpahan minyak yang terjadi 5 kilometer dari perairan Teluk Balikpapan, diduga kejadian ini dilakukan oleh pegawai PT. Pertamina. Peristiwa ini memberikan dampak negatif terhadap lingkungan seperti perusakan ekosistem teluk, bau menyengat, kegiatan ekonomi warga terhambat, dan kenyamanan warga ikut terganggu (Bbc.com).

Di satu sisi, dampak negatif ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat dan pemerintah terhadap perusahaan tersebut dalam jangka panjang. Oleh karena itu perusahaan perlu memberikan perhatian khusus kepada pihak-pihak eksternal perusahaan, tidak hanya fokus terhadap pemenuhan pandangan tradisional dimana keuntungan *financial* perusahaan merupakan satu-satunya capaian perusahaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Grey et al. (1987) dalam Gunawan dan Utami (2008) yang

mengatakan bahwa suatu perusahaan mempunyai kewajiban yang harus senantiasa dipenuhi, kewajiban tersebut tidak hanya pada pemegang saham namun juga terhadap pihak lain termasuk masyarakat.

Pandangan utilitarianisme mendukung perusahaan dalam melakukan strategi jangka panjang yang berkelanjutan. Penerapan strategi keberlangsungan oleh perusahaan sebagai kode etik, mempertahankan keseimbangan lingkungan, mengembangkan sumber daya manusia, dan perilaku tanggung jawab sosial akan membangun reputasi merek dagang dan manajemen bisnis yang lebih baik (Bodhanwala & Ruzbeh, 2017), terlebih lagi jika hal ini didukung dengan perbaikan mekanisme tata kelola perusahaan seperti penerapan pedoman umum *Good Corporate Governance* yang bisa dijadikan pedoman perusahaan dalam menyusun sistem, struktur dan pedoman tata kelola perusahaan serta peraturan internal perusahaan lainnya (*Indonesia Corporate Governance*, 2014).

Mekipun demikian, di sisi lain Friedman (1970) mengatakan bahwa satu-satunya tanggung jawab perusahaan adalah meningkatkan keuntungan sebesar mungkin dan tanggung jawab ini diletakkan dalam tangan para manajer. Friedman menyimpulkan bahwa doktrin tanggung jawab sosial dari bisnis merusak sistem ekonomi pasar bebas. Dalam masyarakat bebas, terdapat satu dan hanya satu tanggung jawab untuk bisnis yaitu memanfaatkan sumber daya dan melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan meningkatkan keuntungan perusahaan. Pandangan Friedman telah dikritik oleh *stakeholder theory*. Menurut Ferrero, Michael,

dan McNulty (2014) pengenalan kewajiban terbatas dalam sistem ekonomi telah menunjukkan bahwa para pemegang saham hanya memiliki kewajiban terbatas, yang memiliki kewajiban penuh adalah pemangku kepentingan perusahaan yang tidak hanya pemegang saham namun masyarakat secara keseluruhan. Artinya, ketika perusahaan bangkrut, pemangku kepentingan yang menanggung bebannya. Suplier kehilangan uang yang dihasilkan dari perusahaan dan masa depan bisnisnya. Tempat dimana perusahaan berada akan kehilangan pendapatan pajak, banyak orang kehilangan pekerjaannya, konsumen akan kehilangan apabila tidak ada substitusi produk dan jasa yang disediakan, dan apabila perusahaan yang terlalu besar jatuh, seluruh masyarakat akan menanggung bebannya dari pajak mereka. Sehingga Freeman (1984) mengatakan bahwa tanggung jawab utama dari para eksekutif adalah menciptakan nilai sebanyak mungkin untuk pemangku kepentingan karena itulah cara menciptakan nilai sebanyak mungkin bagi pemegang saham. Memaksimalkan keuntungan akan sama dengan menciptakan nilai untuk pemangku kepentingan.

Pengungkapan *environmental* dan *social* menjadi hal yang dianggap penting. Pengungkapan ini akan mencerminkan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan secara aktual dan riil (Benlemlih et al., 2016). Ketika praktek bisnis perusahaan dinilai secara lingkungan dan sosial, maka perusahaan dapat menciptakan hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan. Hubungan baik ini terbentuk karena tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan akan menunjukkan bahwa perusahaan itu

adalah perusahaan yang baik (Kim et al., 2017). Sebagai tambahan, adanya hubungan yang baik akan memfasilitasi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, sehingga biaya operasional atau biaya input lebih kecil dan mengurangi risiko (Benlemih et al., 2016). Namun, pengungkapan *environmental* dan *social* saja tidak cukup, dibutuhkan kebijakan lainnya. Pentingnya *corporate governance* saat ini juga menjadi perhatian global, dan identifikasi mekanisme *corporate governance* menjadi isu yang krusial untuk pemangku kepentingan (Kolk & Pinkse, 2010). Pengungkapan *governance* akan mencerminkan seberapa transparan informasi yang diungkapkan (Aritonang, 2018). Transparansi akan membantu mengurangi informasi asimetri antara perusahaan dan investor (Cormier et al., 2005), sehingga pengungkapan *governance* akan memotivasi perusahaan untuk menciptakan mekanisme tata kelola yang optimal dan akan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Kombinasi dari *environmental*, *social*, dan *governance* akan menguatkan praktek manajemen dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Jika kinerja perusahaan baik, maka akan terlihat dalam laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini akan menggunakan profitabilitas sebagai indikator kinerja perusahaan.

Poin-poin pengungkapan ESG ditemukan di laporan keberlanjutan yang diungkapkan oleh perusahaan. Peraturan terbaru POJK Nomor 51/POJK.03/2017 mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik untuk melaporkan rencana aksi perusahaan dan laporan keberlanjutan kepada OJK. Penerapan POJK ini akan dilakukan secara

bertahap karena adanya perbedaan karakteristik dan kompleksitas usaha, sehingga saat ini belum banyak perusahaan yang mengungkapkan laporan keberlanjutannya. Banyak studi empiris di Indonesia yang hanya fokus kepada salah satu dimensi ESG dan sangat sedikit yang melakukan penelitian pada ketiga dimensi tersebut. Penelitian ini akan menggunakan skor pengungkapan ESG yang didapat dari laporan keberlanjutan perusahaan setiap tahun. Skor pengungkapan dihitung berdasarkan *Global Reporting Initiative* (GRI) terbaru yaitu GRI Standards. Diharapkan penelitian ini dapat melihat pengaruh pengungkapan *environmental, social,* dan *governance* terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan profitabilitas di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

PBB telah mengesahkan dokumen yang disebut dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Perpres No. 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam Perpres telah dijelaskan bahwa perusahaan sebagai pelaku usaha dituntut untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam peraturan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 juga mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik untuk mengungkapkan laporan keberlanjutan. Pengungkapan ESG menjadi hal yang dianggap penting dimana jika ketiganya mencerminkan kinerja perusahaan yang baik maka

akan terlihat dalam kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian berikut:

1. Apakah pengungkapan *Environmental, Social, dan Governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan bukti empiris terkait pengaruh pengungkapan *Environmental, Social, dan Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Teori

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan dan tambahan literatur di Indonesia terkait dengan pengaruh pengungkapan *environmental, social, dan governance*.

2. Kontribusi Praktik

Secara praktik, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk memberikan perhatian lebih terhadap pengungkapan ESG di dalam laporan tahunan atau di dalam laporan keberlanjutan. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai informasi tambahan bagi para investor dalam membuat keputusan investasi.